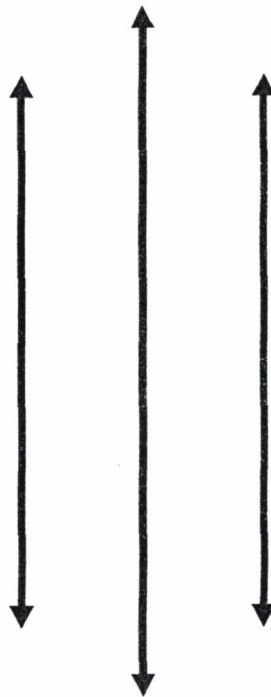


**LAPORAN PANITIA ANGGARAN DPRD
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TENTANG

**PEMBAHASAN RANPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2009**



**DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA KE 55
MASA SIDANG KE III**

SENIN, 15 DESEMBER 2008

**LAPORAN PANITIA ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TERHADAP PEMBAHASAN RANPERDA APBD
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 55 masa sidang III Tahun 2008
DPRD Kab.Pasaman Barat, Senin, 15 Desember 2008

Assalamu'alaikum Wr.Wbr

Yth: Sdr.Bupati Pasaman Barat/ Wakil Bupati Pasaman Barat

Sdr.Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD Pasaman Barat

Yth: Sdr.Muspida Pasaman Barat

Yth: Sdr. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Yth. Sdr. Pimpinan Perbankan/Badan Usaha/Ormas/Orpol ,LSM Pasaman Barat

Yth. Sdr. Sekretaris DPRD beserta Staf

Yth. Sdr. Unsur Media Massa, Undangan hadirin yang kami muliakan.

Pertama sekali marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, untuk menyelesaikan tugas pembahasan Panitia Anggaran terhadap RAPBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009

Selawat dan Salam marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan ucapan Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan, yang telah memberikan waktu kepada Panitia Anggaran DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan Laporan Pembahasan Panggar terhadap RAPBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.

Laporan ini kami sampaikan dengan sistematika Sbb :

Bab I : Pendahuluan :

Bab II : Dasar Hukum Pembahasan dan Personalia

Bab III : Analisa Dan Pembahasan

Bab IV : Penutup

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Tata Tertib DPRD dan aturan perundang-undangan yang berlaku maka mekanisme pembahasan RAPBD Tahun 2009, melalui beberapa tingkatan Pembahasan, baik Internal Panggar, pembahasan bersama TAPD dan SKPD terkait yang dilaksanakan dari tanggal 09 - 12 Desember 2008 dan Finishing pada tanggal 12 Desember 2008 Mulai jam 20.00 - 23.45 Wib . Dan pada hari ini Kesimpulan dan Laporan Panggar kami sampaikan dalam rapat Paripurna yang terhormat ini tentang RAPBD tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan Nota RAPBD yang disampaikan oleh Bupati Pasaman Barat dalam Rapat Paripurna ke 55 tanggal 24 November 2008, tidak ada perubahan yang mendasar sesuai dengan hasil kesepakatan DPRD bersama Pemerintah daerah tentang Kebijakan Umum APBD dan PPA tahun 2009 yang ditetapkan sebelumnya.

Namun dalam Rapat- rapat Panitia Anggaran bersama TAPD yang menjadi pembahasan adalah program kegiatan masing-masing SKPD yang mengacu kepada Kebijakan Umum dan Plafon anggaran masing-masing serta lebih berorientasi kepada sasaran program baik input-output-outcam serta benefit dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan program yang lebih rinci dan fokus dengan kegiatan. Hal ini mengacu kepada Permendagri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, bahwa belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil melalui belanja Langsung (program dan kegiatan), serta melakukan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi dengan lebih mengupayakan program pemberdayaan masyarakat dan Desa/Nagari, dan Pengentasan Kemiskinan.

Pembahasan Panggar tetap berpedoman kepada Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, PMK No. 64/PMK/ 2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan segala perubahannya, Perda No. 5 s/d 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK, Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 sesuai dengan Keputusan

Bupati Pasaman Barat No 188.45/397/Bup-Pasbar/2008 dan Rencana Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.

Ada yang sangat mendasar dalam pembahasan penyusunan anggaran Tahun 2009 ini, seperti prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran untuk lebih diarahkan pada pembangunan kawasan Pedesaan dan program penanggulangan kemiskinan. Sehingga Panggar dan TAPD melakukan penyesuaian antara program dan kebutuhan yang ril sebagai prioritas program bagi masing-masing SKPD, yang dituangkan dalam Alokasi Anggaran pada masing-masing Kecamatan berdasarkan jumlah Penduduk.

Untuk itu Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada rekan-rekan Panitia Anggaran DPRD Pasaman Barat, TAPD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan SKPD yang telah melakukan pembahasan secara intensif terhadap rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD tanpa merubah dan menambah Plapon Anggaran sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, namun ada kegiatan yang dianggarkan dilakukan penyesuaian program dan kegiatan pada masing-masing SKPD seperti Belanja Modal Kendaraan roda 4 dan roda 2, Lettop dan Kamera digital, kecuali kendaraan dinas roda dua pada SKPD Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan SKPD yang baru.

II. Dasar Hukum Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Personalia.

A. Dasar Hukum Pembahasan

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan pembangunan Nasional ;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan segala Perubahannya.
9. Peraturan Presiden RI No. 07 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
10. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah ;
11. Permendagri No. 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 64 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010;
14. Perda No. 4 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan keuangan Daerah
15. Perda No. 5 s/d 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Perangkat Daerah Kab. Pasaman Barat.
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
17. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/397/Bup-Pasbar/2008 tentang Standar Barang dan Jasa Tahun 2009

B. Personalia

Adapun Personalia Panitia Anggaran DPRD Pasaman Barat Tahun 2008 terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Ketua merangkap anggota | : Asgul, SE, MSi |
| 2. Wakil Ketua merangkap anggota | : H. Sudirman Samin |
| 3. Wakil Ketua merangkap anggota | : H. Anwar D, SE |
| 4. Sekretaris bukan anggota | : Drs. Marwazi.B, MM |
| 5. Anggota | : Syafrizal Mandayu, SH.MM |
| 6. Anggota | : Drs. Supriman |
| 7. Anggota | : Drs. Achmad Namlis, MM |
| 8. Anggota | : Agus Susanto |
| 9. Anggota | : Afrizal Teri, SE |

10. Anggota	: Aboe Amin Haryanto, SH
11. Anggota	: Syamrial Jambak
12. Anggota	: Drs. Suhemdi
13. Anggota	: Drs. Jasman Tanjung
14. Anggota	: M. Yunis
15. Anggota	: Andri Jaya, SE
16. Anggota	: Daliyus, K.S.Si
17. Anggota	: Masnil , SP
18. Anggota	: Irwan Matondang
19. Anggota	: Jendri, S.Ag
20. Anggota	: Mahyuddin A Batu Baru, SH
21. Anggota	: Marwi Helfi, SMIQ
22. Anggota	: Ednarsyah, BSc

Sdr. Bupati, Sdr Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami muliakan

III. Analisa dan Pembahasan

Pembahasan Panitia Anggaran tidak bisa dilepas dari KUA APBD dan PPA Tahun 2009 karena Kebijakan Umum APBD adalah sarana dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan prioritas dan plafon anggaran adalah batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD, dan prioritas ini merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang sangat dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sementara tujuannya terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya agar alokasi sumber daya dapat digunakana dan dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis. Sehingga Panitia Anggaran DPRD Pasaman Barat selalu melakukan kajian dan penajaman terhadap RKA yang diajukan oleh masing-masing SKPD dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan program yang akan dilaksanakan.

Implementasi program selalu disinkronkan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 antara lain :

Visi

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat melalui pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dalam suasana aman dan tertib, serta penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan Agama (IPTEK/ IMTAQ)

Pencapaian Visi daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan antara lain :

Misi

- A. Mewujudkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Percepatan Pembangunan Melalui Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik
- B. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Penguasaan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Agama (Iptek Dan Imtaq)
- C. Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan, Pengurangan Kesenjangan Dan , Dan Memacu Kewirausahaan.
- D. Mewujudkan Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- E. Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Ham, Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban, Dan Penyelesaian Pertanahan Yang Berkeadilan.

Visi dan Misi daerah tersebut telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006- 2010. Melalui Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2006. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 dilaksanakan melalui 5 (lima) agenda pembangunan yaitu :

1. Pembangunan SDM yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya
3. Pembangunan pemerintahan yang baik dan bersih
4. Pembangunan Ekonomi tangguh
5. Pengentasan kemiskinan.

Sdr. Bupati, Sdr. Pimpinan, dan Anggota DPRD serta Undangan Yang berbahagia

Muatan penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2009 sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 harus ada sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah daerah serta prioritas pembangunan diarahkan kepada Tiga sasaran yakni Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Pedesaan, Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infra Struktur dan Energi, dan Pemanjapan penataan Birokrasi dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Maka strategi dan kebijakan daerah disarankan agar semakin berhati-hati mengoptimalkan pengalokasian sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih diutamakan bagi pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Panitia Anggaran DPRD Pasaman Barat bersama TAPD melakukan perbaikan dan perubahan terhadap penempatan alokasi anggaran untuk menyesuaikannya dengan pedoman penyusunan RAPBD tersebut antara lain : Diambil kesimpulan bahwa untuk tahun anggaran 2009 kebijakan untuk tidak memberikan anggaran pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, pengadaan laptop dan Kamera digital dengan total anggaran Rp. 2.798.245.000,- yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan dana pada SKPD seperti BLU RSUD, dinas Perkebunan, Dispora dan Setda Bagian Hukum dengan total Anggaran Rp. 2.300.000.000,- sementara sisa pengurangan tersebut lebih kurang 116 juta rupiah dipergunakan untuk pemberian honor pegawai tidak tetap (PTT) atau Kontrak yang ada pada Dinas Perhubungan, DPKAD serta petugas K3 yang ada pada Sekretariat DPRD dengan pemberian honor Rp. 600.000,- /bulan/orang.

Disamping itu keputusan sebelumnya berkaitan dengan penyelesaian pembangunan sarana perkantoran tetap dianggarkan sesuai dengan plafon yang termaktub dalam PPA. Pengadaan kantor baru hanya ada pada Dinas Perhubungan dengan pembangunan Kontruksi bangunan Pengadaan Alat Pengujian Mekanik sebesar Rp. 3.458.510.700,- dan untuk bangunan Rp. 1,4 Milyar, dengan rencana kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 1.000.000.000,- pada tahun 2009 dan lokasinya

ditanah Pemda Padang Tujuh termasuk lokasi untuk pembangunan GOR yang telah ditinjau langsung oleh Tim Panggar dan TAPD pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2008.

Selanjutnya pada Dinas Pendidikan dilakukan penyesuaian program terhadap peningkatan dan kualitas pengelolaan Kelas Unggul SMAN 1 Pasaman yang sebelumnya hanya dialokasikan untuk biaya konsumsi dan insentif guru sebesar Rp. 1.215.000.000,- oleh Panggar bersama TAPD dilakukan penyesuaian untuk peningkatan kualitas unggul tersebut dengan membangun gedung Asrama Putri sebesar Rp. 300.000.000,- dan pembangunan KCK sebesar Rp. 100.000.000,-serta pengadaan buku penunjang pelajaran dan perpustakaan sebesar Rp. 15.000.000,-dan lain-lainnya sebagaimana telah dicantumkan dalam RKA Dinas Pendidikan.

Pada Dinas Pertambangan diadakan penambahan biaya untuk pembelian tonggak listrik untuk daerah terpencil sebesar Rp. 990.990.000,- yang diambilkan dari dana pengadaan PJU Rp. 550.990.000,- dan pembelian Bus pada Bagian Umum Rp. 440.000.000,- dan perbaikan sarana PJU dialokasikan Rp. 40.000.000,- yang diambilkan dari dana Pembangunan PLTA Piko Mikro.

Pada Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan penyesuaian kegiatan pada program pengembangan destinasi wisata dengan peningkatan bangunan sarana dan prasarana pariwisata sebesar Rp. 432.024.000,- dialokasikan hanya Rp. 232.024.000,- dan sisanya dialokasikan untuk penambahan dana Pekan Olah Raga Propinsi sebesar Rp. 500.000.000,-

Pada Badan Layanan Umum (BLU) RSUD sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2008 bahwa Pendapatan pada RSUD sebesar Rp. 1.000.000.000,- harus dialokasikan untuk kegiatan pada Layanan Umum termasuk Jamkesmas dan biaya pengobatan keluarga miskin. Demikian juga penambahan pada Dinas Perkebunan karena anggaran sebelumnya telah dialokasikan pada perubahan anggaran untuk pengadaan bibit Sawit maka dialokasikan kembali tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 700.000.000,- Demikian juga pada Bagian Hukum Setda dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai penambahan anggaran dalam rangka kegiatan Bantuan Hukum Pemkab. Pasaman Barat. Total kebutuhan untuk dianggarkan sebagai penambahan akibat penyesuaian tersebut berjumlah Rp. 2.300.000.000,-

Untuk menutupi kekurangan akibat pergeseran dan penyesuaian serta penambahan anggaran pada masing-masing SKPD diatas diambilkan dari Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua pada masing-masing SKPD sebesar

Rp. 1.476.103.000.- dan pembelian Laptop Rp. 860.000.000.- serta pembelian Kamera Digital/ Handycam sebesar Rp. 80.630.000.-. Total jumlah keseluruhan Rp. 2.416.733.000.-. Dari kebutuhan tersebut dan telah dialokasikan kepada penambahan SKPD sebagaimana disebutkan diatas sisanya berjumlah Rp. 116.733.000.-

Dana sebesar Rp. 116.733.000.- tersebut sebagaimana keputusan dalam rapat finishing Panitia Anggaran bersama TAPD dialokasikan untuk honor Pegawai Tidak tetap (PTT) dan Kontrak pada Dinas Perhubungan sebanyak 3 orang, DPKAD untuk tenaga pemungut Pajak di 11 Kecamatan (11 orang) dan 2 orang tenaga kebersihan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai catatan bahwa pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua tetap dialokasikan sesuai dengan petunjuk DAK terutama pada SKPD yaitu 1 unit kendaraan roda empat untuk kegiatan penyuluhan keluarga berencana (DAK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan 1 unit untuk puskel pada Dinas Kesehatan (DAK), 1 unit Mobil pemadam kebakaran pada Kantor Kesbangpol (APBD), 1 unit mobil box kesehatan ikan dan 1 unit kendaraan roda dua pada Dinas Perikanan dan Kelautan (DAK), 15 unit kendaraan roda dua untuk operasional penyuluh pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (APBD), 11 unit kendaraan roda dua pada Dinas Kesehatan (DAK), dan 7 unit kendaraan roda dua pada Bagian Umum Setda untuk Polres Pasaman Barat.

Untuk mendukung operasional Sekretariat pada masing-masing SKPD dialokasikan anggaran untuk pembelian Laptop / Note Book , Kamera dan Handycam sebagai berikut :

a. Belanja Modal Laptop/ Notebook :

No	Nama Organisasi	Banyak
1.	Dinas Kependudukan dan Capil	1
2.	Kantor Penanaman Modal	1
3.	Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.	1
4.	Kantor Kesbang Pol Linmas	1
5.	Bagian Umum Setda	2
6.	Bagian Pengolahan Data Elektronik	1
7.	Sekretariat DPRD	2
8.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	2
9.	Inspektorat	2

10.	Kantor Pelayanan Satu Pintu	1
11.	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	2
Jumlah		16

b. Belanja Modal Kamera :

No.	Nama Organisasi	Banyak
1.	Dinas Kependudukan dan Capil	1
2.	Bagian Humas	1
3.	Sekretariat DPRD	3
4.	DPKAD	1
5.	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	1
Jumlah		7

c. Belanja Modal Handycam :

No.	Nama Organisasi	Banyak
1.	Badan PMPPKB	1
2.	Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan	1
Jumlah		2

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 24.319.500.000.- sebelumnya pada saat pembahasan KUA PPAS diasumsikan sebesar Rp. 23.319.500.000.- adapun penambahan sebesar Rp. 1.000.000.000.-diprediksi dari pengadaan alat uji kendaraan bermotor (KIR) yang dioperasionalkan pada tahun 2009. Selanjutnya dalam rangka penguatan terhadap pendapatan asli daerah pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan perhitungan ulang dari sektor pendapatan pajak penerangan jalan yang dikelola oleh PT. PLN. Disamping itu mengefektifkan pemberlakuan Perda Kabupaten Pasaman Barat yang berhubungan dengan sektor pajak dan retribusi daerah.

2. Penerimaan Dana Perimbangan

Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2009 sebesar Rp. 399.182.910.000.- terdiri dari dari dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak Rp. 27.673.380.000.-

Dana Alokasi Umum Rp. 323.130.530.000.- sedangkan dana alokasi khusus Rp. 48.379.000.000.-

3. Penerimaan Dana Lain-lain Pendapatan yang sah.

Penerimaan dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 12.000.000.000.- berasal dari dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Pendapatan Daerah :

No	Uraian Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Ket
A.	Pendapatan				
1.	Pendapatan Asli Daerah	19.062.541.650.-	21.302.269.450.-	24.319.500.000.-	
2.	Dana Perimbangan	342.344.659.711.-	378.829.003.090.-	399.182.910.000.-	
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Syah	18.779.360.675.-	12.065.156.218.-	12.000.000.000.-	
	J u m l a h	380.186.562.036.-	412.196.428.758.-	435.502.410.000.-	

b. Belanja Daerah :

No	Uraian	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Ket
1.	Belanja Tidak Langsung	181.153.712.367.-	219.208.655.034.-	239.976.562.479.-	
2.	Belanja Langsung	281.537.091.878.-	253.147.161.718.-	282.740.412.685.-	
3.	Jumlah	462.690.813.245.-	472.355.816.752.-	522.716.975.164.-	

Dari total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 522.716.975.164.- mengalami kenaikan dari Tahun 2008 sebesar Rp. 50.361.158.412.- (9,63 %), dan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 435.502.410.000,- jika dibandingkan dengan Tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.305.981.242,- (5,35 %) pada Tahun Anggaran 2009.

Dari Total Pendapatan Daerah bila dibandingkan dengan Belanja Daerah untuk Tahun 2009. ini, Pemerintah Daerah Pasaman Barat mengalami Defisit sebesar Rp. 87.214.565.164.- atau (16,68 %). Defisit ini akan ditutupi melalui Silpa Tahun 2008 sebesar Rp. 65.000.000.000,- dan transfer Dana Deposito sebesar Rp. 15.000.000.000,- setelah dikeluarkan penyertaan modal infestasi daerah Rp. 2.500.000.000,- dan transper dana deposito Rp. 15.000.000.000,- sehingga

pembiayaan netto untuk menutupi defisit sebesar Rp. 62.500.000.000,- maka didapati sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan sebesar Rp. 24.714.565.164.- masih dibawah batas toleransi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebesar 5,67 % dari Total Pendapatan Daerah.

Sdr. Bupati, Sdr. Pimpinan dan anggota DPRD, para undangan yang kami muliakan.

IV. Penutup :

Dari laporan yang kami sampaikan ini, dapat kami simpulkan bahwa pembahasan RAPBD tahun anggaran 2009 dapat dengan cepat kita selesaikan, bilamana kita mematuhi ketentuan skedul pembahasan sesuai dengan amanat undang-undang. Disamping itu Nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD tentang RAPBD Tahun Anggaran 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, merupakan dasar utama dalam Pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian program dan target kinerja SKPD, dan dimohonkan kepada masing-masing SKPD untuk menyesuaikan Penyusunan RKA nya sesuai dengan Pergeseran, Perobahan akibat dilakukannya Pembahasan oleh Panggar Legislatif bersama TAPD.

Demikinlah laporan panggar ini kami sampaikan, dengan harapan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi kita semua dalam melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD tahun anggaran 2009 sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2009.

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Assalamu'alalaikum Wr Wb.

**Panitia Anggaran DPRD
Kabupaten Pasaman Barat
Wakil Ketua,**



H. SUBIRMAN SAMIN

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN DAERAH

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	24,319,500,000	
1.1.1	Pajak Daerah.	5,410,000,000	
1.1.2	Retribusi Daerah	5,762,500,000	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13,147,000,000	
1.2	Dana Perimbangan	399,182,910,000	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	27,673,380,000	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	323,130,530,000	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48,379,000,000	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,000,000,000	
1.3.1	Hibah	-	
1.3.2	Dana Darurat	-	
1.3.3	Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12,000,000,000	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	
1.3.6	Bantuan Sarana Kesehatan/ HWS	-	
1.3.7	Pengembalian Gaji	-	
	Jumlah Pendapatan	435,502,410,000	
2	BELANJA DAERAH		
2.1	Belanja Tidak Langsung	239,976,562,479	
2.1.1	Belanja Pegawai	213,416,562,479	
2.1.2	Belanja Bunga	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	-	
2.1.4	Belanja Hibah	6,650,000,000	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,100,000,000	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	360,000,000	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	9,950,000,000	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	
2.2	Belanja Langsung	282,740,412,685	
2.2.1	Belanja pegawai		
2.2.2	Belanja barang dan jasa		
2.2.3	Belanja modal		
	Jumlah Belanja	522,716,975,164	
	Surplus/(Defisit)	-87,214,565,164	
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	65,000,000,000	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	
	Transfer dana deposito dan giro	15,000,000,000	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan	80,000,000,000	
3.2	Pengeluaran pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	2,500,000,000	
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	-	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	
	Transfer Dana Deposito	15,000,000,000	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	17,500,000,000	
	Pembiayaan Netto	62,500,000,000	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-24,714,565,164	